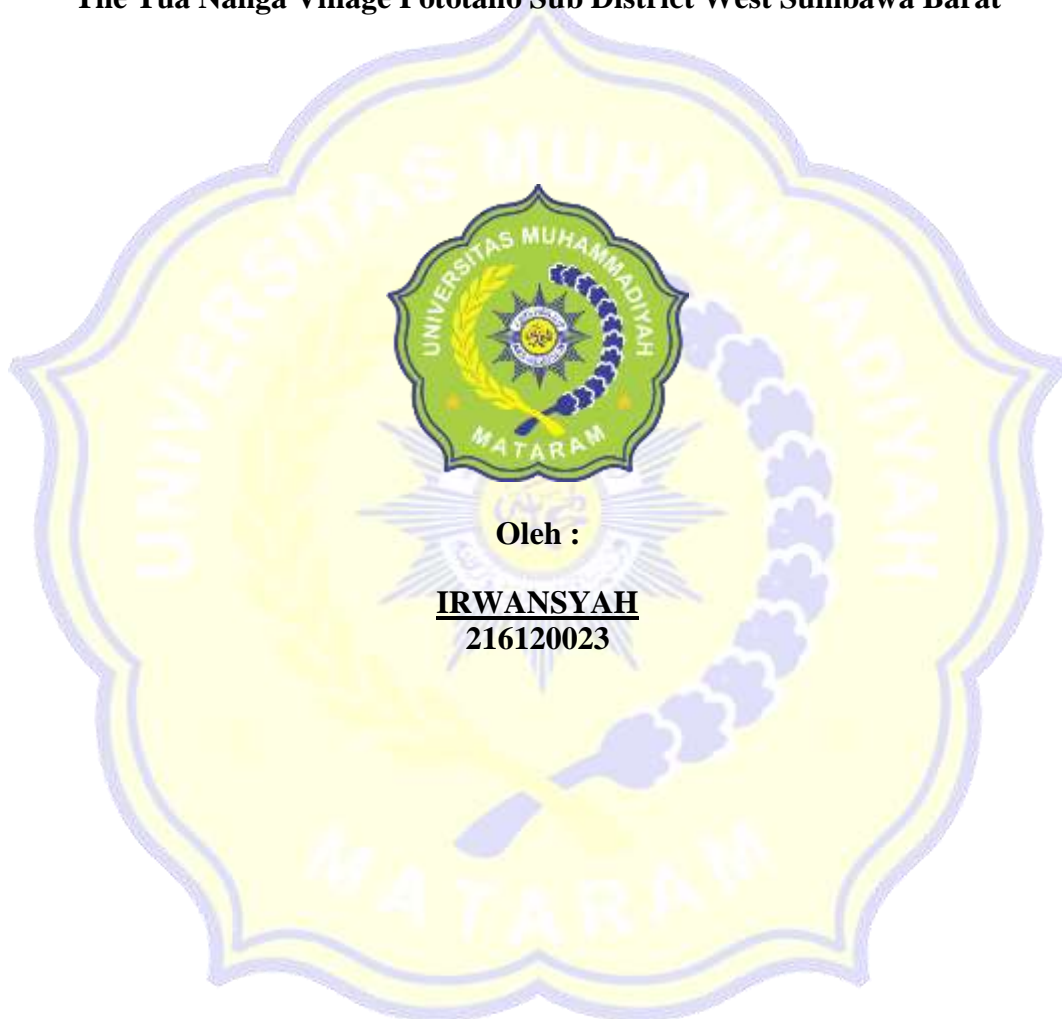


SKRIPSI

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TUA NANGA
KECAMATAN POTO TANO KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**The Role Of Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) On Community Welfare In
The Tua Nanga Village Pototano Sub District West Sumbawa Barat**



Oleh :

IRWANSYAH
216120023

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2019

SKRIPSI

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TUA NANGA
KECAMATAN POTO TANO KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**The Role Of Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) On Community Welfare In
The Tua Nanga Village Pototano Sub District West Sumbawa Barat**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam
memperoleh gelar sarjana Starata Satu (S1) pada Program Studi
Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Mataram**



Oleh :

**IRWANSYAH
216120023**

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TUA NANGA
KECAMATAN POTO TANO KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Strata Satu (S1)
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Mataram**

Disusun Oleh:

IRWANSYAH

216120023

Disetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Drs. H. Junaidy A.M, MP
NIDN. 0819125701


Selva, SE., MSc
NIDN. 0811118601

Mengetahui

Ketua Program Studi Administrasi Bisnis




Lalu Hendra Maniza, S.Sos. MM
NIDN.0828108404

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DESA TUA NANGA KECAMATAN POTO TANO KABUPATEN
SUMBAWA BARAT**

Oleh:

IRWANSYAH
216120023

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Ujian Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Bisnis
Konsentrasi Entrepreneur

Mataram ,01 Februari, 2020

Tim Penguji

Drs. H. Junaidy AM.MP
NIDN. 0819125701

Selva, S.E., M.Sc
NIDN. 0811118601

Lalu Hendra Maniza, S.Sos, MM
NIDN. 0828108404



Mengetahui

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

Dekan



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram :

Nama : IRWANSYAH

NIM : 216120023

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TUA NANGA KECAMATAN POTO TANO SUMBAWA BARAT”** adalah hasil karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan dan dikutip dengan mengikuti tata penulis karya ilmiah yang lazim. Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa rekayasa dari pihak manapun.

Mataram, 02 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



IRWANSYAH

NIM. 216120023



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRWAN SYAH
NIM : 216120023
Tempat/Tgl Lahir : Tuananga, 05 - 10 - 1997
Program Studi : Administrasi Bisnis (Entrepreneur)
Fakultas : FIKIP01
No. Hp/Email : 082 341 246 689

Judul Penelitian : -

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TUA NANGA KECAMATAN
POTO TANO KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 41%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 13 Februari 2020



Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



RIWAYAT HIDUP



Irwansyah lahir di Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano. Anak pertama dari bapak Sawaludin dan ibu Zaenap. Peneliti menyelesaikan sekolah dasar di SDN Tua Nanga tepatnya di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat dan selesainya pada tahun 2010, dan pada tahun itu pula peneliti juga melanjutkan pendidikan di SMPN Satap Tua Nanga di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat dan selesainya pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Sekolah Menengan Atas di SMAN 1 Poto Tano dan selesai tahun 2016. Peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Mataram Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik (FISIPOL) pada program studi Ilmu administrasi Bisnis konsentrasi enterprener, peneliti menyelesaikan pendidikan strata S1 pada tahun 2020.

MOTTO

BERANGKAT DENGAN PENUH KEYAKINAN, BERJALAN DENGAN
PENUH KEIKHLASAN, ISTIQOMAH DALAM MENGHADAPI COBAAN.

YAKIN , IKHLAS DAN ISTIQOMAH



PERSEMBAHAN

Yang utama dan segalanya...

sembah sujud serta syukur kepada Allah Swt.

Taburan cinta dan kasih syangmu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu, membekaliku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad S A W

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

1. Orang tua tercinta ibuk Zaenap dan bapak Sawaludin, sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhinga kupersembahkan karya kecil ini kepada ibuk dan bapak yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga, yang tidak mungkin akan ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini sebagai langkah awal untuk membuat ibuk dan bapak bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk ibuk dan bapak yang selalu memberikan aku motivasi dan semangat untuk terus berjuang dan selalu menyirami kasih sayang, dan selalu mendoakanku, sekali lagi terimakasih ibuk dan bapak.
2. Untuk seluruh keluarga yang sudah mendukung dan mendoakan saya.
3. Untuk sahabat yang sudah berjuang bersama-sama dari awal masuk kuliah, terimakasih atas bantuan, motivasi, dan nasehatnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga penulisan proposal yang berjudul “ Peran Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini telah banyak mendapat bantuan, ide dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani., M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Lalu Hendra Maniza S.Sos, MM, selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs. H. Junaidy AM, MP, selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam memberikan penulisan proposal Skripsi.

5. Selva. SE. M.Sc, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam memberikan penulisan proposal Skripsi.
6. Ayah dan Ibu (Orang Tua) yang telah memberikan dorongan , semangat serta do'a.
7. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Semua aktivitas akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Serta semua pihak dan teman-teman yang telah membantu, memberikan masukan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat ketidak sempurnaan dalam tekhnik penyajian dan materi dari proposal ini. Oleh karena itu dengan senang hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran-saran untuk perbaikan demi kesempurnaan tulisan ini.

Mataram, 2 Januari 2020

Penulis

IRWANSYAH
NIM:216120023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
RIWAYAT HIDUP.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	9
2.2 Otonomi Desa.....	15
2.3 Penelitian Terdahulu.....	17
2.4 Definisi Peran.....	22
2.5 Kesejahteraan.....	24

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	30
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.3. Fokus Penelitian.....	32
3.4. Metode dan Dasar Penelitian	32
3.5. Sumber Data.....	33
3.5.1 Data Primer	33
3.5.2 Data Sekunder	34
3.6. Teknik Penentuan Informan.....	34
3.7. Informan Penelitian.....	35
3.8. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.9. Teknik Analisa Data.....	38

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	41
4.1.1 Gambaran Umum Desa Tua Nanga	41
4.1.2 Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	46
4.1.3 Unit Kegiatan Usaha Badan Usaha Milik Desa	49
4.2 Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tua Nanga dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.....	52
4.2.1 Pendapatan	53
4.2.2 Konsumsi Pengeluaran.....	58
4.2.3 Pendidikan.....	61

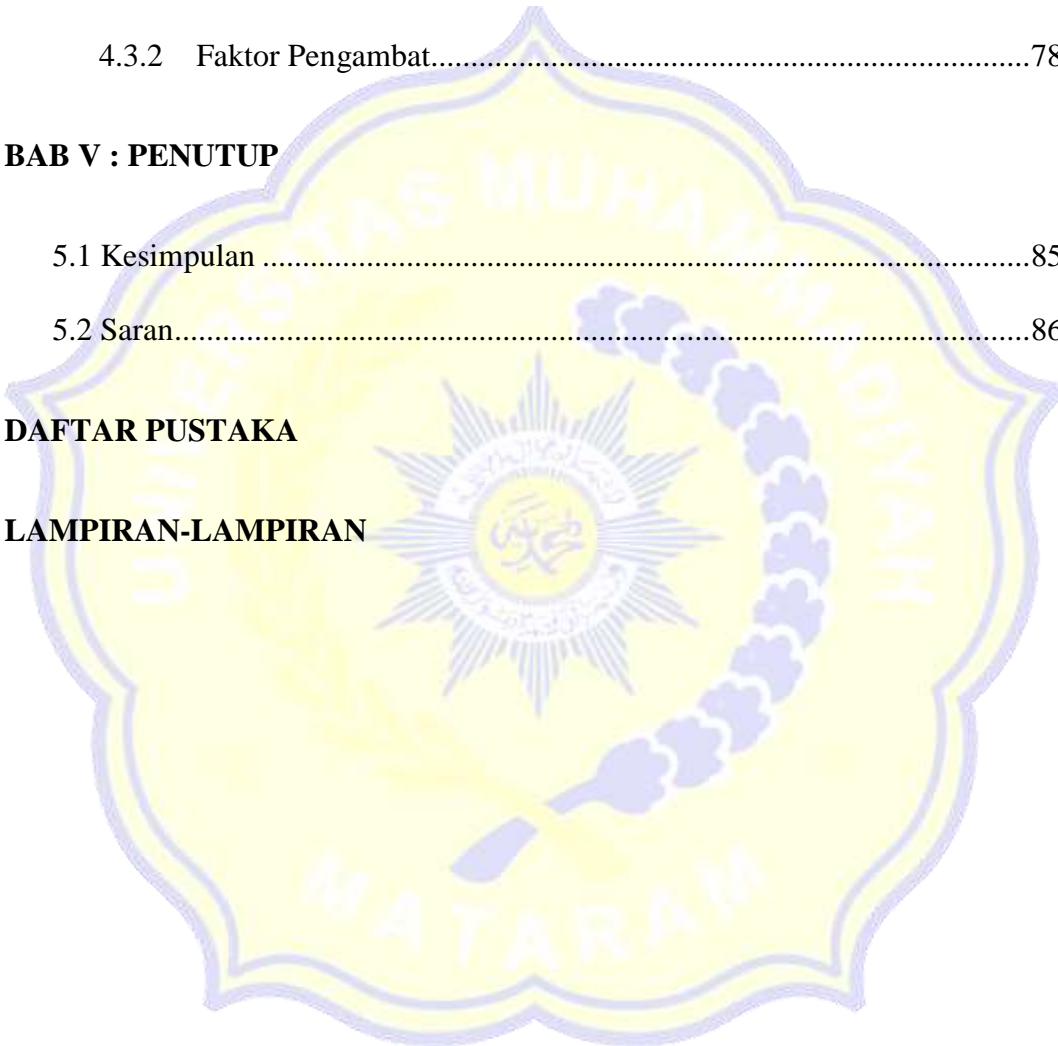
4.2.4 Kesehatan	65
4.2.5 Perumahan Masyarakat	70
4.3 Faktor Yang Mempengaruhi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	73
4.3.1 Faktor Pendukung	73
4.3.2 Faktor Pengambat.....	78

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

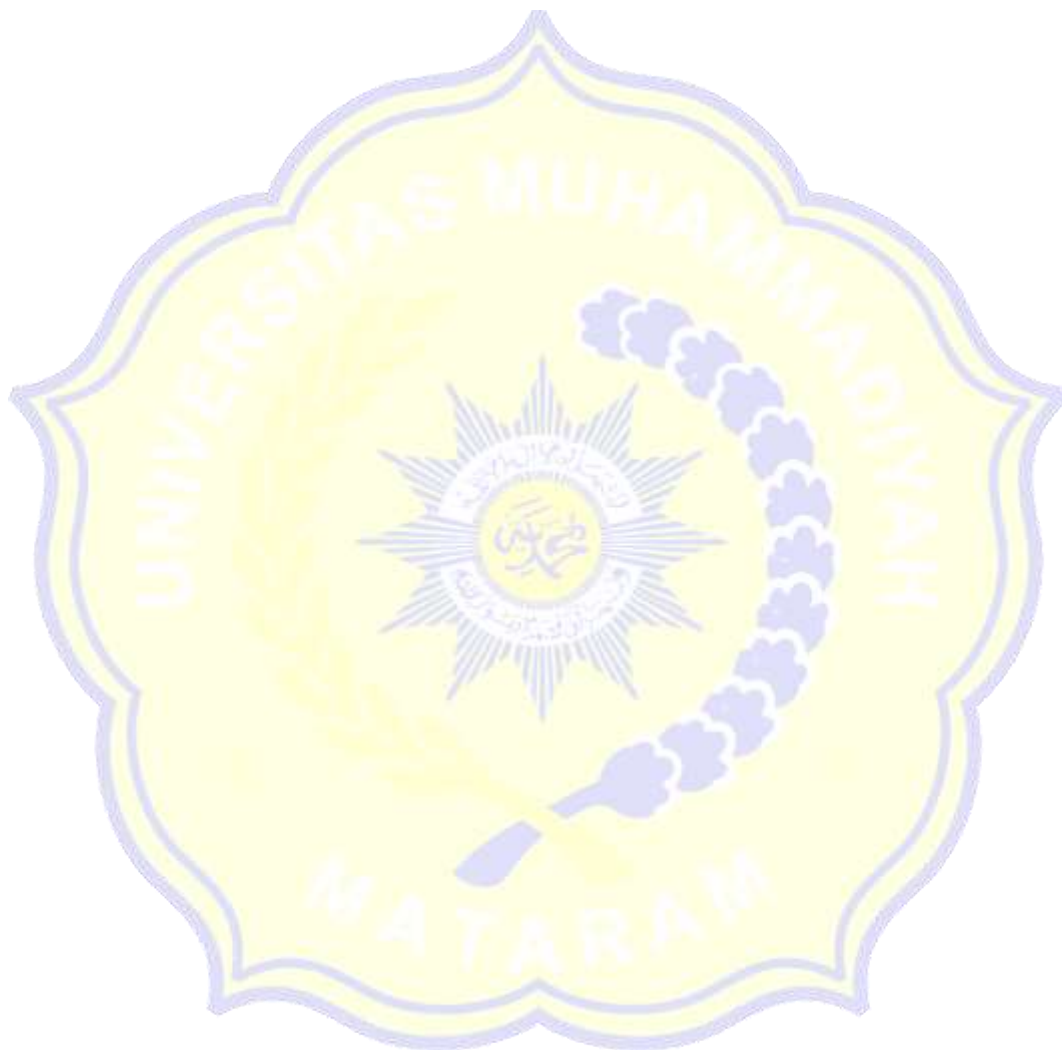
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	31
Tabel 4.1.2 Jumlah Penduduk DesaTua Nanga berdasarkan jenis kelamin.....	42
Tabel 4.1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	43
Tabel 4.1.4 Mata Pencarian Berdasarkan lapangan pekerjaan.....	44
Tabel 4.1.5 Sarana Dan Prasarana DesaTua Nanga	45
Tabel 4.1.3 Potensi Desa Tua Nanga	49
Tabel 4.2 Jumlah Pengguna Jasa Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tua Nanga Tahun 2018 dan 2019	55
Tabel 4.2.a Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di DesaTua Nanga Tahun 2018 dan 2019	57
Tabel 4.2.3 Perbandingan Tingkat Pendidikan Masyarakat DesaTua Nanga Tahun 2018-2019	63
Tabel 4.2.4 Status Kesehatan Masyarakat Desa Tua Nanga 12 Februari - 15 Desember Tahun 2018	66
Tabel 4.2.4.a Iuran Anggota Unit Usaha Pengelolaan Sampah Tahun 2018-2019 DesaTua Nanga	69
Tabel 4.2.5 Status Perumahan Masyarakat DesaTua Nanga Tahun 2018	71
Tabel 4.3 Luas Wilayah DesaTuananga.....	75
Tabel 4.3.2 Ketersediaan Anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Saling Beme DesaTua Nanga.....	80

Tabel 4.3.2.a Rekapitulasi Anggaran Unit Usaha Pengelolaan Sampah Tahun
2018.....82



Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di DesaTua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa pemerintah desa dianjurkan memiliki suatu lembaga perekonomian yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga masyarakat sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan khususnya kebutuhan pokok. Adanya lembaga ini diharapkan dapat menggali potensi yang dimiliki oleh desa dan kemudian dikembangkan sebagai salah satu produk yang berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Seperti Pemerintah Desa Tua Nanga yang mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak tahun 2018. Harapannya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dapat berperan secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum berperan secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga jika menggunakan indikator kesejahteraan yaitu pendapatan, konsumsi pengeluaran, pendidikan, kesehatan dan perumahan masyarakat. Selain itu pelaksanaan unit usaha juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi sebuah faktor pendukung program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah rendahnya ketersediaan anggaran yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi kendala dalam memaksimalkan program serta tidak adanya agenda sosialisasi yang pernah direncanakan ataupun dijalankan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tua Nanga sejak tahun 2018.

Kata Kunci :Peran, BUMDes, Kesejahteraan Masyarakat.

The Role of BUMDES (Village-Owned Enterprises) Towards Community Welfare in *Tua Nanga Village*, Poto Tano District, West Sumbawa Regency

ABSTRACT

Law No. 6 of 2014 concerning villages elucidates that the governments of village is recommended to have a financial institution, namely Village Owned-Enterprises (BUMDes). Village-Owned Enterprises is the community institutions as a means to meet special needs especially the basic needs. The existence of this institution is expected to be able to exploit the potential of the village and be developed as one of the products intended for improving the people's economy. The establishment of Village-Owned Enterprises by *Tua Nanga Village* Government since 2018 was expected to significantly support the community welfare. The method used in this research is descriptive qualitative, the data collection techniques done through interviews, observation and documentation. Generally, the results of the study showed that the Village-Owned Enterprises do not yet supported optimally in improving the welfare of the community in *Tua Nanga Village*, if it is refers on welfare indicators namely income, consumption, education, health and public housing. In addition, the implementation of business units also involves several factors such as the payment of abundant natural resources (SDA) and a high level of community participation is a supporting factor for the Village Owned Enterprises program. While the inhibiting factor is the lower budget issued by the Village-Owned Enterprises is being a barrier in maximizing the program, and there was no socialization agenda undertaken by the management of the Village-Owned Enterprises of *Tua Nanga Village* since 2018.

Keywords; Role, Village Owned-Enterprises, Community Welfare

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan sebuah negara luas yang tidak hanya berpusat di ibu kota semata, melainkan pergerakan perekonomian maupun pengembangan sebagai bentuk perwujudan pencapaian cita-cita negara juga berlangsung pada tingkat desa. Seperti yang kita ketahui bahwa 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di daerah pedesaan, sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah di kawasan desa. Keberadaan desa juga menentukan keberhasilan pemerintah dalam hal pembangunan baik itu dari tingkat daerah maupun pusat, sehingga dalam hal ini kemajuan suatu desa sangat menentukan kemajuan suatu Negara (Lorosa, 2017).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desa juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 angka 1). Menurut Badrudin (2012:156) menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial

warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri (Undang - Undang No 11 tahun 2009).

Dengan demikian, desa merupakan suatu wilayah yang sangat memerlukan pembangunan dan pengembangan khususnya basis ekonomi. Pembangunan ini merupakan suatu usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan baik itu pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, maupun kesenjangan antara desa dan kota. Disamping itu, pembangunan pedesaan dipandang juga sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan maupun perumahan (Rani, 2018).

Adanya suatu upaya untuk melakukan pembangunan dan pengembangan di wilayah desa merupakan suatu strategi yang mengarah pada tujuan utama yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang menjadi suatu kebijakan atau program yang sudah direncanakan lalu kemudian diimplementasikan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Kesejahteraan masyarakat dalam hal ini adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar seperti rumah yang layak, tercukupinya sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah serta berkualitas atau suatu kondisi dimana suatu individu atau orang atau kelompok mampu memaksimalkan kemampuan pada tingkat batas anggaran tertentu serta kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia khususnya masyarakat di pedesaan tentu direalisasikan melalui beberapa kebijakan ataupun

program yang dalam pelaksanaannya sudah terlihat sejak adanya otonomi daerah sebagai salah satu bentuk strategi pembangunan desa. Menurut Suharto (2005:132) menjelaskan bahwa strategi pembangunan desa merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi, yang berisi program untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan. Akan tetapi strategi pada kenyataannya, pembangunan pedesaan dirasa masih kurang sehingga masih banyak desa tertinggal. Akan tetapi pada faktanya, telah banyak cara yang sudah ditempuh oleh pemerintah untuk mengentaskan masalah ketertinggalan desa tersebut, seperti meningkatkan anggaran untuk pembangunan desa dari tahun ke tahun agar mampu mengurangi jumlah desa yang tertinggal, dan beberapa program lainnya.

Meninjau masalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan pedesaan, maka salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh desa yaitu dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diartikan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Selain itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan asset-asset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur di dalam pasal 213 ayat (1) Undang - Undang

Nomor 32 Tahun 2004, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, yang didalamnya mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu pada pasal 78-81 bagian kelima tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu dilakukan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah berdiri dapat berfungsi sesuai dengan peranannya.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan *sustainable*. Selain itu, dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) inidiharapkan desa menjadi lebih mandiri dalam hal pengelolaan aset desa atau sumber daya desa agar dilakukan secara optimal dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera.

Pada saat ini sudah banyak desa yang mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan mampu menjalankannya secara optimal yang tentunya memberikan dampak besar terhadap kemajuan pedesaan dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Namun tidak menutup kemungkinan dari beberapa desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) namun belum memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan pada hampir seluruh wilayah pedesaan di Indonesia, begitu juga dengan salah satu desa yang

bernamaTua Nanga dan berlokasi di wilayah Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Desa Tua Nanga sebagai sebuah desa yang terdiri atas 12 Rukun Tetangga (RT) dan 6 Dusun, dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya sebagai petani dan nelayan(www.sumbawabaratkab.go.id).Adapun pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Tua Nanga sejauh ini menurut analisa sementara penulis bahwa pelaksanaannya belum mampu memperbaiki kehidupan masyarakat ataupun memberikan dampak akan adanya peningkatan kesejahteraan. Hal ini didasarkan pada data jumlah masyarakat miskin dan pengangguran yang relatif masih tinggi, sampai saat ini yang mencapai jumlah lebih dari 500 orang (www.sumbawabaratkab.go.id). Dengan angka yang cukup tinggi tersebut tentu memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa Tua Nanga. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seharusnya dapat menjadi stimulus terhadap perbaikan kualitas kesejahteraan masyarakat, namun harapan tersebut berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Sehingga masalah tersebut sampai saat ini belum diketahui faktor apa yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tuananga.

Dari permasalahan diatas, membuktikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di desa Tua Nanga masih jauh dari harapan. Meskipun pemerintah desa telah mampu mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari masa pemerintahan kepala desa yang satu kepada kepala desa yang baru, namun belum mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat di desa Tua Nanga sampai saat ini. Bahkan sampai tahun kedua pendirian Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes), tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang berhubungan dengan pengembangan ataupun pemberdayaan masyarakat yang dapat memperbaiki perekonomian masyarakat pada khususnya.

Disisi lain desa Tua Nanga mempunyai potensi yang cukup baik disektor pariwisata khususnya pantai dan disektor pertanian. Namun, kedua sektor ini sebagai salah satu aset desa ternyata belum mampu dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah setempat dengan memaksimalkan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam hal ini, seharusnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi solusi yang cukup efektif digunakan dalam mengembangkan beberapa sektor yang menjadi aset desa dan mampu membangun desa Tua Nanga menjadi desa yang lebih maju dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang tinggi.

Selain itu, pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tua Nanga seharusnya dapat memperbaiki perekonomian masyarakat yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi hal tersebut justru berbanding terbalik dengan realita dilapangan, dimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Tua Nangan belum mampu mencapai tujuan utama dan menjalankan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara optimal. Sehingga sampai saat ini belum ada perbaikan perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Tua Nanga.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**”

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat ”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat dan mendukung Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menghambat dan mendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan untuk :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pembahasan-pembahasan mengenai kebijakan publik yang mengarah pada konsep kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya penelitian

ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang terkait.

2. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi Pemerintah desa Tua Nanga dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar pelaksanaannya lebih optimal dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai sasaran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Kamoaroesid 2004 : 16).

Menurut Maryunani (2008 :59), menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli Desa dapat diperoleh dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, hal ini dilakukan agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang tentu dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%), dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, anggotaBadan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat mengajukanpinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Adapun beberapa tujuan dan fungsi didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Herry (2011:34), menyebutkan bahwa ada empat tujuan utama pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu :

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan *sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

untuk mencapai tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar.

Selain itu, dinyatakan di dalam Undang-Undang bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud kebutuhan dan potensi desa adalah kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, tersedia sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan pasar, tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat, adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi (Maryunani, 2008).

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) awalnya disepakati melalui musyawarah desa yang membahas tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), organisasi pengelola dan modal usaha serta Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hasil kesepakatan musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ditanda tangani oleh kepala desa.

Disamping itu, Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan

dan potensi desa”. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat”.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dipahami sebagai lembaga usaha yang menampung kegiatan ekonomi desa dan dikelola oleh desa. Namun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak diharapkan mematikan bisnis masyarakat yang telah terlebih dahulu ada disuatu desa. Setiap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mampu hidup mandiri dan mau diwajibkan untuk membuat koperasi dan kemandirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dicirikan laba meningkat, dan unit usaha dan/atau produk yang bervariasi. Berdasarkan harapan-harapan tersebut, menurut Ibnu (2018) menyebutkan bahwa ada beberapa indikator kesuksesan (maju dan mandiri) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu :

1. Laba atau profit dan aset yang meningkat secara kontinu dan konsisten. Hal tersebut terwujud salah satunya jika Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki perencanaan dan tujuan (*planning and goals*) yang baik, terdokumentasi dan terlaksana dengan baik pula.
2. Jaringan yang meningkat, termasuk meluasnya cakupan konsumen atau pasar yang dituju melalui kemampuan menciptakan berbagai produk dan unit usaha, dan melalui kemampuan menciptakan berbagai kolaborasi yang bersifat saling menguntungkan antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan pihak-pihak lain (swasta atau pemerintah).
3. Kepuasan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) cenderung positif dan tinggi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini termasuk kepuasan terhadap aspek manajemen organisasi dan kemampuan para karyawan dalam melaksanakan tugas.
4. Kepuasan masyarakat desa cenderung positif dan tinggi terhadap manfaat dari adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Indikatornya apabila Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat seperti membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan peluang pendidikan, memperbaiki akses transportasi dan lain-lain serta mencegah

konflik (karena adanya persaingan dengan usaha-usaha sejenis di desa masing-masing).

Dengan demikian, didirikannya Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) di setiap wilayah pedesaan yang ada di Indonesia diperkuat oleh beberapa regulasi yang berkaitan erat dengan pemerintahan daerah dan desa. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia pertama kali direalisasikan pada tahun 2004 sejak disahkan dan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperjelas lagi oleh regulasi baru tentang desa. Selain itu pada tahun 2014 desa diberikan sebuah peluang untuk mengatur dan membangun desa secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan potensi desa yang kemudian dikemas dalam bentuk otonomi desa.

2.2 Otonomi Desa

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai masyarakat hukum yang mempunyai susunan berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dituntut dan menuntut di muka pengadilan (Widjaja, 2003 : 56-57).

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "*Development Community*", dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "*Independent*

Community”yaitu desa dan masyarakatnya berhak mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik maupun ekonomi.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Pengakuan otonomi desa menurut Widjaja (2003 : 63-61), menjelaskan sebagai berikut :

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintah desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan

pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten dan kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam proposal ini penulis mengangkat beberapa referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Bagian ini memuat secara sistematis terkait hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam penelitian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama penulis dan Tahun (1)	Judul (2)	Temuan (3)
1	Rani, (2018)	<i>Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Presfektif Islam.</i>	(1) Peran dan kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) KaryaAbadi dalam mensejahterakan masyarakat telah diwujudkan dengan

		<p>adanya unit-unit yang ada di dalamnya seperti unit usaha sektor riil yaitu penyediaan alat-alat sembako, jasa pelayanan, peminjaman modal maupun penyewaan mesin mollen dan juga kontribusi yang diberikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) baik itu terhadap Pendapatan Desa maupun kepada masyarakat seperti pengadaan seminar ataupun penyuluhan tentang kewirausahaan. (2) Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat menurut ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan materi saja tetapi juga non</p>
--	--	--

			<p>materi. Dana pinjaman dan penyediaan sembako maupun jasa pelayanan yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Abadi adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini merupakan sifat saling tolong-menolong sesama muslim, dan tentunya sesuai dengan tujuan maupun prinsip ekonomi Islam itu sendiri yaitu kemaslahatan umat</p>
No	(1)	(2)	(3)
2	Atshil, (2017)	<i>Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk</i>	(1) adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

	<p><i>Pandan Kabupaten Pesawaran</i></p>	<p>mengembangkan usaha yang dimilikinya. Beberapa unit usaha yang didirikan BUMDes memberi peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan baru dan membantu memobilisasi potensi yang dimilikinya. Dengan adanya BUMDes memberikan motivasi dan stimulus kepada masyarakat dalam mengembangkan usahanya guna meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga.</p> <p>(2)partisipasi masyarakat yang sangat aktif menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa</p>
--	--	---

			Hanura
No	(1)	(2)	(3)
3	Widyastuti (2017)	<i>Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam Puji Kerto Kecamatan Trimujo Kabupaten Lampung</i>	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera yang berdiri sejak tahun 2013 sudah memiliki 3 unit usaha yaitu penyewaan handtractor, unit usaha ternak sapi dan unit usaha pasar desa. Dari ketiga unit itu hanya penyewaan handtractorlah yang mampu berkembang dengan baik.

2.4 Definisi Peran

Menurut Koziar Barbara dalam Rani (2018) menjelaskan bahwa peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Selain itu, menurut Horton dan Hunt (1993) dalam Aslamiah (2017), menjelaskan bahwa peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status dinamakan dengan perangkat peran (*role set*). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat atau yang disebut dengan struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (*nature*) dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumber daya yang langka diantara orang-orang yang memainkannya.

Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Sedangkan menurut Levinson dalam Aslamiah (2017:19), menjelaskan bahwa peran mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Adapun peran yang dimaksud dalam hal ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam situasi sosial. Adapun faktor-faktor penyesuaian peran yang mempengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan peran yang harus dilakukan, yaitu :

- a. Kejelasan perilaku dan pengetahuan antar peran yang diemban.
- b. Konsistensi respon orang yang berarti terhadap peran yang dilakukan.
- c. Kesesuaian dan keseimbangan antar peran yang diemban.
- d. Keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran.
- e. Pemisahan perilaku yang akan menciptakan ketidaksesuaian peran perilaku.
- f. Proses yang umum untuk memperkecil ketegangan peran dan melindungi diri dari rasa bersalah.

2.5 Kesejahteraan

2.5.1 Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Menurut Fahrudin (2012:145) menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut

sehingga dia memperoleh 34 kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah. Dalam Undang – Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009).

Di antara tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
- c. Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, menurut Badrudin (2012;15) konsep kesejahteraan memiliki beberapa kata kunci yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar, dan juga dapat melaksanakan fungsi sosial warga Negara. Upaya untuk mencapai kesejahteraan dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Kesejahteraan terdiri dari dua macam yaitu:

a. Kesejahteraan Perorangan

Kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi lainnya, kesejahteraan perorangan sinonim dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan dari warga yang bersangkutan.

b. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat adalah masyarakat yang memiliki tata kehidupan materil spiritual, jasmani dan rohani maupun tata kehidupan individu dan sosial yang disertai dengan rasa aman, makmur, sentosa dan selamat, yaitu dengan terlepas dari segala macam gangguan, hambatan dan kekacauan agar kedepannya dapat mencapai taraf hidup yang tenteram lahir maupun batin dan mampu memenuhi kebutuhan baik jasmani, rohani maupun sosial masyarakatnya. Dalam hal ini, kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan masyarakat desa.

2.5.2 Indikator Kesejahteraan

1. Indikator Kesejahteraan Secara Umum

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Fahrudin (2008 : 61), menjelaskan bahwa ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sejahtera, yaitu: anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja dan bepergian, bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah, bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti Keluarga Berencana ataupun tugas kesehatan serta diberi cara Keluarga Berencana dengan cara yang lebih modern.

Dari beberapa penjelasan indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator meliputi :

1) Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

- a) Tinggi (Rp.>5.000.000)
- b) Sedang (Rp. 1.000.000-Rp.5.000.000)
- c) Rendah (< Rp.1.000.000)

2) Konsumsi Pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga atau keluarga. Selama ini berkembang penelitian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan yang mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga atau keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan akan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan yaitu 80% dari pendapatan.

3) Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan kemajuan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang serupa nilai-nilai luhur yang hasil kewajiban untuk memenuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku

jiwa patriotisme dan sebagainya. Menurut menteri pendidikan kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib belajar 9 tahun.

4) Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia antar Negara adalah *Human Development Indeks* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir), pendidikan (angka melek huruf dan sekolah) serta ekonomi (pengeluaran riil perkapita). Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera meliputi pangan, sandang, dan papan.

5) Perumahan Masyarakat

Menurut Biro Pusat Statistik dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap yang baik. Bangunan yang dianggap sejahtera adalah luas lantainya lebih dari 10 m dan bagian terluas dari rumah bukan tanah dan penguasaan tempat tinggal adalah milik sendiri. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengkonsepkan perkembangan kesejahteraan masyarakat Desa sebagai ukuran kesejahteraan keluarga atau taraf hidup masyarakat, terdiri dari lima tingkat kesejahteraan, yaitu:

1. Keluarga prasejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan.
2. Keluarga sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya.
3. Keluarga sejahtera II, yaitu keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, juga kebutuhan sosial psikologisnya akan tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal juga kebutuhan sosial perkembangannya.
4. Keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan perkembangan, namun belum dapat berpartisipasi maksimal terhadap masyarakat baik dalam bentuk sumbangan material, keuangan maupun ikut secara aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
5. Keluarga sejahtera III plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan baik dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis maupun yang bersifat perkembangan serta telah dapat memberikan sumbangan nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat dan pembangunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti dengan penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubungan dengan teori dan data yang ada, sehingga mendapat suatu kesimpulan (Suyanto,2005 : 166).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Di samping itu juga akan dibahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Desa ini sebagai salah satu Desa yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat yang sudah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan sudah diimplementasikan. Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang kaya dengan data-data penunjang untuk penelitian ini sehingga dapat membantu permasalahan yang ada dilokasi penelitian.

Adapun penelitian ini direncanakan akan dilakukan kurang lebih dua bulan ,yakni mulai dikeluarkan surat izin penelitian. Waktu selama 2 bulan tersebut dianggap cukup untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, sehingga data-data yang diperoleh tersebut valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Waktu penelitian ini dijadwalkan dan direncanakan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Waktu Penelitian

No	Nama kegiatan	Tahun 2019-2020					
		Agust	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Pengajual judul						
2	Penyusunan proposal						
3	Seminar proposal						
4	Persiapan penelitian						
5	Pengumpulan data						
6	Pengolahan data						
7	Analisis data						
8	Bimbingan skripsi						
9	Penyusunan skripsi						
10	Sidang skripsi						

3.3 Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka jangkauan dari ruang lingkup penelitian ini perlu ditegaskan. Sesuai dengan judul yang penulis angkat, oleh karena itu peneliti ingin berfokus untuk mengamati dan meneliti peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat dan mengamati faktor apa saja yang mempengaruhi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Tua Nanga.

3.4 Metode dan Dasar Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai suatu masalah, gejala yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara sistematis (Sugiyono, 2014:46). Tipe deskriptif didasarkan pada peristiwa yang terjadi pada saat peneliti sedang melakukan penelitian di lokasi. Kemudian menganalisisnya dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di teori dan selanjutnya menarik kesimpulan.

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada narasumber atau informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga.

3.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan data tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu;

3.5.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2014:57) menjelaskan bahwa data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian ataupun data yang bersumber dari informan atau narasumber yang berkaitan dengan variabel penelitian ataupun Badan usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tua Nanga.

Adapun data primer yang digunakan dan dibutuhkan oleh peneliti, antara lain :

1. Data hasil wawancara dengan informan pertama (I) Hamzah selaku Kepala Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat mengenai sejarah berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Data hasil wawancara dari informan kedua (II) Mansyur selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tua Nanga mengenai profil dan program kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Data hasil wawancara dari informan ketiga (III) Nurdin selaku bendaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tua Nanga mengenai anggaran dan alokasi dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tua Nanga

4. Data hasil wawancara dari informan keempat (IV) Masyarakat Desa Tua Nanga sebagai pengguna Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengenai pelayanan yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.

3.5.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2014:58) menjelaskan bahwa data sekunder adalah data yang telah terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh organisasi diluar penelitian itu sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Data ini sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk narasi, tabel-tabel atau diagram-diagram. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari data sekunder berupa: (1). Laporan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (2). Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (3). Data penduduk Desa Tua Nanga yang meliputi data tingkat kesejahteraan, tingkat pengangguran dan, (4). Lain-lain serta data-data lain yang terkait dengan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) yang peneliti peroleh dari media publik.

3.6 Tehnik Penentuan Informan Penelitian

Dalam penelitian ini teknik penentuan informan penelitian yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Patilama (2013:46) menjelaskan bahwa *purposive sampling* dipandang lebih mampu menangkap kelengkapan dan kedalaman data di dalam menghadapi realitas yang tidak tunggal. Untuk memperoleh data yang diinginkan, penulis memperoleh data atau informasi dari narasumber terpercaya atau narasumber kunci (*key informan*) terlebih dahulu.

Data yang diperoleh harus sesuai dengan fokus utama penelitian yang telah ditetapkan untuk melengkapi dan menjawab masalah yang akan diteliti.

3.7 Informan Penelitian

Menurut Patilama (2013:49), informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai subyek peneliti. Adapun subyek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hamzah selaku Kepala Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.
- b. Mansyur selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tua Nanga.
- c. Nurdin selaku bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tua Nanga.
- d. Masyarakat Desa Tua Nanga sebagai pengguna Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian dan sumber data yang digunakan, maka terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan, dimana penggunaan beberapa teknik pengumpulan data ini secara bersama-sama diharapkan akan saling melengkapi. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2014:32), antara lain :

3.8.1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondennya sedikit. Menurut Sugiyono (2014:33) menjelaskan bahwa teknik ini merupakan komunikasi langsung antara peneliti dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara terhadap :

1. Kepala Desa Tua Nanga (Hamzah)
2. Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tua Nanga (Mansyur)
3. Bendaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tua Nanga
4. Masyarakat Pengguna Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tua Nanga sebanyak 9 orang.

3.8.2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014: 65) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar , misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif (Sugiyono 2014:82). Dokumen ini digunakan untuk memperkuat setiap pelaksanaan program atau kegiatan dari suatu kebijakan publik yang

diimplementasikan. Adapun dokumen atau arsip yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data tertulis berupa:

1. Data Profil Desa tahun 2017
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Tua Nanga tahun 2017

3.8.3. Observasi

Menurut Sutopo (2002:64), observasi adalah menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar dimana observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan teknik observasi, memungkinkan peneliti untuk mengamati dari dekat masalah yang diteliti. Peneliti hanya mencatat apa yang sesungguhnya tampak sebagai gejala dan menghindari pendapat pribadi terhadap peristiwa atau gejala tersebut. Cara ini digunakan untuk memperoleh data-data yang tidak bisa diperoleh melalui wawancara. Data tersebut dapat berupa tingkah laku (tindakan), kebiasaan, cara kerja dan sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

3.9 Teknik Analisis Data

Menurut Patton (1994) dalam Subana (2005:132) menjelaskan bahwa teknik analisis data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Patton (1994) membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Sedangkan menurut Bogdan dan Tylor (2001) dalam Subana (2005, 133-134) menjelaskan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk

menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu. Jika dikaji, definisi pertama lebih menitik beratkan pada pengorganisasian data sedangkan yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Dengan demikian definisi tersebut dapat disintesis menjadi analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, serta mengumpulkan data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara dengan informan penelitian dan dokumen di lapangan yang berkaitan dengan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan lapangan dengan memilah hal-hal yang pokok yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, rangkuman catatan-catatan lapangan itu kemudian disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu data diperlukan kembali. Dalam penelitian ini peneliti mereduksi dan memilah data hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Karena data yang diperoleh dari lapangan masih kompleks dan bersifat mentah. Maka peneliti hanya akan memilih data yang benar-benar

relevan berkaitan dengan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga.

3. Display Data

Display data dilakukan dengan menyusun sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data ini dilakukan dengan melihat keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian terkait dengan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Kesejahteraan masyarakat di desa Tua Nanga. Data disajikan dalam bentuk teks naratif untuk menjelaskan proses yang terjadi dari tahap perencanaan pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hingga tahap implementasi serta peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tua Nanga terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Dari data yang telah disajikan tersebut kemudian diolah berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya untuk memperoleh gambaran secara jelas. Keseluruhan data yang telah diolah peneliti tersebut kemudian dikumpulkan menjadi satu oleh peneliti untuk kemudian disajikan hingga mencapai tahap kesimpulan.

4. Verifikasi dan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan adalah penarikan kesimpulan dengan berangkat dari rumusan atau tujuan penelitian kemudian senantiasa diperiksa kebenarannya untuk menjamin keabsahannya. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian berlangsung secara triangulasi. Menurut Norman K. Denkin dalam Sugiyono (2014:69) mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai

metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perpektif yang berbeda. Sehingga dengan adanya metode ini akan menjamin signifikansi atau kebermanaan hasil penelitian. Pengambilan kesimpulan diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan. Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga.

